

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pengelolaan, analisis data, maka disimpulkan bahwa

1. Program dan kegiatan Pemerintah Nagari Kasang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertama, sosialisasi Pemerintah Nagari Kasang dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat adat dan melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) , Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan tokoh lembaga adat Nagari Kasang. Kedua, pembentukan struktur Posbakum (pos bantuan hukum) oleh pemerintah nagari. Ketiga, pembentukan satuan pemuda Nagari Kasang. Keempat, koordinasi bersama Polsek setempat perihal patroli malam di Nagari Kasang bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Program-program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam penerapan program maupun kegiatan keamanan dan ketertiban di masyarakat terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Kasang. Adapun kendala tersebut adalah komunikasi Pemerintah Nagari Kasang belum optimal dengan informasi sosialisasi yang dilaksanakan belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat, kurang kesadaran dari masyarakat Nagari Kasang terhadap kebijakan nagari, minimnya anggaran mengenai program dan kegiatan keamanan ketertiban, Nagari Kasang belum mempunyai portal nagari. kendala-kendala tersebut menghambat proses penerapan program dan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang dalam pandangan *siyasah syar'iyah* belum sepenuhnya efektif karena prinsip *syura* (musyawarah) dan prinsip perlindungan belum sepenuhnya terlaksana. Pemerintah Nagari Kasang belum optimal dalam menjaga perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*) dengan masih banyak kasus pencurian dan tempat hiburan malam. Oleh sebab itu perlu upaya yang lebih efektif dalam peningkatan 3 tujuan utama tersebut dengan pengadaan ronda rutin dan penutupan secara permanen tempat hiburan malam dengan Penetapan sanksi adat bagi yang melanggar agar terciptanya kemaslahatan umum.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran konstruktif sebagai berikut:

Perlunya peningkatan program dan kegiatan oleh Pemerintah Nagari Kasang dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan agar terciptanya asas keterbukaan. Selanjutnya penetapan peraturan nagari berdasarkan adat salingka Nagari Kasang mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan portal nagari untuk akses masyarakat dalam proses pelaporan terhadap masalah keamanan dan ketertiban. Diimbangi dengan peningkatan logistik (lampu jalan, cctv dan pos ronda) serta penugasan pemuda disetiap korong dengan kegiatan ronda malam secara rutin di Nagari Kasang. Pemerintah Nagari Kasang harus mengambil tindakan tegas dengan penutupan total tempat hiburan malam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afwadi. 2010. *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat atau Format Negara*. JURIS
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1986. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*. Semarang: Toha putra Semarang.
- Aromatica, Desna. 2021. *Pemerintah Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembagunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Azizah, Sofa Sofiatul, dan Dadang Yudhistira. 2025. Mashlahah. *Journal Of Islamic Economics*
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2026. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Entri Fungsi." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- BPS. 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
- BPS, Padang Pariaman. 2024. Statistik daerah 2024 Padang Pariaman
- Buzar, Ali. 2024. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Kasang Dalam Merealisasikan Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2023 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*
- Dino, Qadrinal. 1996. *Dampak Pemekaran Kotamadya Padang terhadap Pembangunan Pertanian di Kecamatan Koto Tangah (1967-1994)*. Padang.
- Fahmi, Mutiara. 2017. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*
- Gahansa, Windy Valentine, dan Michael Mantiri. 2018. Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*,
- Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul Al. 1993. *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*. kairo.

- Handrina, Emi. 2019. Pembangunan Jalan Padang By Pass Dan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar Emi Handrina. *Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development Planning*
- Harrison, P, & Roberts, L. 2024. *The Role of Governance in Sustainable Development*. Public Policy Review.
- Hilal, Fatmawati. 2024. *Fikih Siyasah*. Vol. 1. Publisher: Pusaka Almaida.
- Iman, Haerul Nurul Sakinah darsal Gita Syahriana Junas. 2026. Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan Tafsir of the Verse regarding the Obligation to Implement the Principles of Trust. *Jurnal intelek dan cendikiawan nusantara*
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Janice, Astrella. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*
- Kallsum, Ummi A. 2025. Peran Polres Pinrang Dalam Pembinaan Satuan Pengamanan Non-Sertifikat (Tinjauan Siyasah Dusturiyah). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kusnardi, dan Bintang R. Saragih. 2018. *Ilmu Negara*. jakarta: Gaya Media Pratama.
- Laary, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal administrasi publik*
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Mansoer, M.D, et all. 1970. *Sejarah Minang*. Jakarta: Bhratara.
- Mawardi, Al. 1970. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Fikr.
- Monalisa, Dkk. 2021. kendala masyarakat dalam melaksanakan kegiatan siskambling di nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan. STKIP PGRI Sumatera Barat.

- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nofiardi, N. 2021. Kearifan Lokal dan Sistem Keamanan Sosial di Nagari Minangkabau. *Jurnal Adat & Pemerintahan Lokal* 3(1): 56–69.
- Novar, Siska Serly dkk. 2021. Dampak Industrialisasi Pedesaan dalam Ketahanan Sosial Masyarakat Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5: 6017–23.
- Pal, Kurniawan. 2024. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Umum Terhadap Peracun Ikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Nagari Pakan Raba Timur Kabupaten Solok Selatan). UIN Imam Bonjol Padang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 2009. *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari*.
- Poerwadarminta, W J S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, Annisa dan Syamsul Bahri. 2024. Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau menurut Hukum Adat (Suatu Studi Di Nagari Singgalang Kec. X Koto). *Jurnal Hukum Progresif*
- Putri, Rianda prima. 2021. Pemilihan Wali Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Padang Pariman. *Ensiklopedia of Journal*
- Rahama, Agung Pangestu Dwi. 2018. Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita , Kecamatan Siantar Martoba , Kota Pematangsiantar). UIN Sumatera Utara Medan.
- Raharjo, Muhamad mu'iz. 2021. *Tata Kelola Pemerintah Desa*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahmat, Agusra Darmini Roza2 Beatrix Benni. 2024. Implementasi Kewenangan Dprd Kota Pariaman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi tentang. *Ekasakti Legal Science Journal* 1
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. 2024. Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 136.
- Rauf, Rahyunir. 2015. *Pemerintahan Desa*. Diedit oleh Yusri Munaf.

yogyakarta: ZanaFa PUBlisHing.

Refdiana. 2017. Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Vol. 1999.

———. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. ACM International Conference Proceeding Series.

Republik Indonesia, DPR. 2023. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Padang Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat*.

Republik Indonesia, DPRD. 2018. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. Vol. 3.

Republik Indonesia, Kemenkumham. 2018. *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Panduan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta.

Riadi, Muchlisin. 2018. KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). *Kajian Pustaka*.

Rianto, Riko. 2012. Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Riki Rianto PROGRAM REGULER MANDIRI Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah. Universitas Andalas.

Ridwan. 2020. *Fiqh Politik*. Amzah.

Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, dan Fardan Ardinata. 2024. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2 No1: 380–86.

Salim, Abdul Muim. 1994. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: raja grafindo persada.

Setyawan, Dody, Agus Priantono, dan Firman Firdausi. 2021. George Edward iii Model.

Tinov. 2015. Peranan Pemerintahan Nagari dalam Pelaksanaan

Pembangunan di Kenagarian Guguak VIII Koto. *Jom FISIP*

Triana, agisca. 2023. Peran Lurah Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Beliung Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Universitas Jambi.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *kebijakan publik. Sustainability (Switzerland)*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2). 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. n.d.

Utsaimin, Muhammad Bin shalih Al. 2019. *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Griya Ilmu Jakarta.

Vel, J.A.C., & Bedner, A.W. 2015. Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.

Widodo, Gyarso. 2010. Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab al-Siyah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taymiyyah. UIN Sunan Kalijaga.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Widyardi, catur dkk. 2021. Efektifitas Tugas Pokok Fungsi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai. *jurnal Dinamika ekonomi*

Winarko, Mursyidah Lailul. 2024. Empowerment of Satlinmas in Improving Public Order and Security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*.

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Prapanca.

Yayan, Hidayat dkk. 2017. *Transformasi dan Dualisme*.